

BAHAN JUMPA PERS

Industri Jasa Keuangan Non Bank

PENGATURAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN IKNB

PERKEMBANGAN PENYUSUNAN PERATURAN BIDANG IKNB TAHUN 2014

Peraturan yang telah ditetapkan tahun ini adalah 5 POJK DAN 2 SEOJK:

1. POJK Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian
2. POJK Nomor 05/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan kelembagaan Lembaga Penjaminan
3. POJK Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan
4. POJK Nomor 7/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan
5. POJK Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran Dana Pensiun
6. SEOJK Pedoman Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan
7. SEOJK Laporan Keuangan Bulanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Laporan Keuangan Bulanan Dana Jaminan Sosial

PROGRESS PERATURAN IKNB 2014 (1)

1. POJK LKM

- Penyusunan RPOJK mengenai LKM merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM
- 3 RPOJK yang diusulkan: RPOJK tentang kelembagaan LKM, RPOJK tentang penyelenggaraan usaha LKM, dan RPOJK tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM
- Draft RPOJK telah disusun dan telah dilakukan RDP dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada bulan Juni 2014 sebanyak 7 kota, yaitu: Solo, Surabaya, Serang, Bengkulu, Bandung, Mataram, dan Makassar
- OJK telah meminta tanggapan kepada publik melalui penempatan rancangan POJK di website OJK tanggal 24 Juni 2014.

PROGRESS PERATURAN IKNB 2014 (2)

2. POJK Pembiayaan

- Tujuan penyempurnaan peraturan mengenai perusahaan pembiayaan adalah untuk memacu pertumbuhan industri pembiayaan
- 3 RPOJK yang diusulkan: RPOJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, RPOJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan RPOJK tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan
- Pokok pengaturan yang diusulkan: perluasan kegiatan usaha, penyempurnaan ketentuan prudensial, penguatan kelembagaan, dan pengaturan pengelolaan usaha

PROGRESS PERATURAN IKNB 2014 (3)

3. POJK Produk Asuransi

- Pokok pengaturan yang diusulkan: produk asuransi, isi polis, penetapan premi, pelaporan produk asuransi, pemasaran produk asuransi, pemantauan serta penghentian pemasaran produk asuransi. Dalam POJK ini juga mengatur mengenai aktuaris perusahaan asuransi

4. SEOJK Komite yang Dibentuk Dewan Komisaris Perusahaan

- Dalam POJK ini juga mengatur mengenai komite yang dibentuk dewan komisaris perusahaan.

PROGRESS PERATURAN IKNB 2014 (4)

5. SEOJK Bentuk, Susunan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

- Dalam POJK ini juga mengatur mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyusunan rencana korporasi dan rencana bisnis perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

6. SEOJK Bentuk dan Susunan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

- Dalam POJK ini juga mengatur mengenai bentuk dan susunan laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian

7. SEOJK Laporan Pengelolaan Program BPJS dan DJS

- Dalam POJK ini mengatur mengenai laporan pengelolaan program BPJS dan DJS

PROGRESS PERATURAN IKNB 2014 (5)

8. POJK Perubahan Besar Santunan

- Dalam POJK ini juga mengatur mengenai perubahan besar santunan

9. POJK Perubahan Investasi Dana Pensiun

- Dalam POJK ini mengatur mengenai perubahan investasi dana pensiun

10. SE Pedoman LJKNB

- 2SEOJK yang diusulkan adalah pedoman penilaian tingkat risiko LJKNB, pedoman pemeriksaan langsung LJKNB.
- 2SEDK yang diusulkan adalah pedoman pengawasan LJKNB berbasis risiko, pedoman prosedur pemeriksaan langsung LJKNB.

PROGRESS PERATURAN IKNB 2014 (6)

11. POJK Asuransi Mikro

- Dalam POJK ini mengatur mengenai asuransi mikro

12. POJK Tarif Premi Asuransi

- Dalam POJK ini mengatur mengenai tarif premi asuransi

13. PDK Likuidasi dan Pembubaran Dana Pensiun

- Dalam PDK ini mengatur mengenai likuidasi dan pembubaran dana pensiun

14. PDK Pedoman Pemeriksaan BPJS

- Dalam PDK ini mengatur mengenai pedoman pemeriksaan BPJS

15. POJK Tata Kelola BPJS

- Dalam POJK ini mengatur mengenai tata kelola BPJS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA PERASURANSIAN (RUU PERASURANSIAN)

- RUU Perasuransian saat ini dalam proses pembahasan di DPR bersama instansi terkait (Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, OJK, dan LPS), terakhir tanggal 19 Agustus 2014. DPR dan Pemerintah sepakat utk membagi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke dalam 3 buku.
 1. Buku 1: DIM yang tetap (tidak terdapat tanggapan dari fraksi) dan terdapat catatan/tanggapan minor dari fraksi sehingga dapat langsung diteruskan ke Tim Perumus;
 2. Buku 2: DIM yang memerlukan diskusi lebih lanjut antara DPR dan Pemerintah;
 3. Buku 3: DIM yang memerlukan diskusi lebih lanjut dan perlu minta pendapat/masukan dari pihak lain.
- Dari 426 DIM usulan Pemerintah di Buku 1, disepakati 297 DIM tetap di Buku 1 dan 129 pindah ke Buku 2. Buku 2 berisi 268 DIM (termasuk pindahan dari Buku 1) dan Buku 3 berisi 20 DIM.
- Pembahasan Buku 1 sudah selesai disepakati, sementara Buku 2 baru dibahas sampai 188 DIM.
- Saat ini, tengah dibahas mengenai substansi terkait dengan batas kepemilikan asing, peningkatan kapasitas asuransi dan reasuransi, penjaminan polis, perpajakan, peran menteri keuangan, sanksi pidana.

JASA PENUNJANG IKNB

PERKEMBANGAN JASA PENUNJANG IKNB TAHUN 2013

Industri	Jumlah	Aset (miliar Rp)	Pendapatan (miliar Rp)
Pialang Asuransi	152	3.720,13	1.444,20
Pialang Reasuransi	29	524,41	130,93
Perusahaan Keagenan Asuransi *	25	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi *	26	-	-
Perusahaan Konsultan Aktuaria *	28	-	-
Total	260	4.244,54	1.575,13

* Perusahaan Agen, Penilai Kerugian Asuransi, dan Konsultan Aktuaria belum diwajibkan menyampaikan laporan keuangan

Catatan:

✓ Data berdasarkan laporan audited 2013

✓ Aset 2013 naik 21,40% (2012=Rp3.496,28M), pendapatan naik 18,94% (2012) Rp1.324,33M

KELEMBAGAAN

- Perizinan
 - Terdapat 9 perusahaan dalam proses perizinan: 5 perusahaan pialang asuransi (PT Fokus Solusi Proteksindo, PT Barron Pandu Abadi, PT Kantata Mitra Jamindo, PT Bintang Jasa Selaras, PT Legowo Pialang Asuransi), 1 Perusahaan Pialang Reasuransi (PT Smart Re), dan 3 Perusahaan Agen (PT Bima Perkasindo, PT Proteksindo Talenta Sukses, dan PT Proteksindo Manfaat Abadi)
 - Terdapat 4 izin Baru yang diterbitkan: 1 Perusahaan PA (PT Asyiki Sarana Sejahtera), 1 Perusahaan Pialang Reasuransi (PT Andalan Resiko Lestari), dan 2 Perusahaan Agen (PT Optima Mitra Sejahtera dan PT Usayasa Utama)
- Penetapan Kelulusan Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)
 - Sesuai amanat pasal 23 POJK nomor 4/2014, PSP, TA, dan TKA perusahaan jasa penunjang dapat diajukan penetapan kelulusan PKK
 - Terdapat 343 pihak utama yang diajukan permohonannya untuk memperoleh penetapan kelulusan PKK dan sebanyak 141 penetapan kelulusan telah selesai diproses
 - Sebanyak 202 permohonan lainnya sedang dalam proses dengan status telah direspon dengan permintaan kelengkapan dokumen.

PENYUSUNAN DATABASE AGEN

- Untuk meningkatkan perlindungan konsumen, saat ini sedang disusun database agen asuransi individual.
- Perusahaan asuransi telah diminta untuk menyampaikan data seluruh agen per individu agen
- Pada 7 Juni 2014, OJK telah berkoordinasi dengan AAJI dan AAUI sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat keagenan asuransi agar AAJI dan AAUI menyampaikan data agen untuk dilakukan *crosscheck* dengan data dari perusahaan asuransi.
- Berdasarkan data AAJI, saat ini agen asuransi jiwa yang telah bersertifikat ada sebanyak 1 juta agen, namun yang tercatat masih aktif sebagai agen asuransi sebanyak 360 ribu agen
- Berdasarkan data AAUI, agen asuransi umum yang bersertifikat saat ini berjumlah 18.000 agen. Sedangkan agen yang bersertifikat khusus untuk penjualan surety bond sebanyak 1300 agen.

PENGATURAN

- Sosialisasi Peraturan Pialang Asuransi dan Reasuransi
 - Dalam rangka mengingatkan kembali kewajiban-kewajiban perusahaan pialang asuransi dan reasuransi dan meningkatkan layanan OJK, telah diadakan sosialisasi peraturan terkait pada tanggal 15 Juli 2014
 - Pada intinya sosialisasi mengingatkan kembali kepada pelaku usaha atas kewajiban pelaporan rutin maupun non rutin yang harus disampaikan ke OJK disertai penjelasan tentang dokumen yang harus dilampirkan.
- Sosialisasi eReporting Pialang Asuransi dan Reasuransi
 - eReporting versi 1.0 untuk laporan keuangan perusahaan pialang asuransi dan reasuransi telah disosialisasikan pada tanggal 15 Juli 2014
 - Perusahaan diminta untuk melakukan ujicoba eReporting untuk penyampaian laporan keuangan Semester I/2014 yang jatuh tempo tanggal 31 Juli

PENGATURAN (2)

- Self Assessment GCG
- Sesuai dengan amanat POJK Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, OJK bersama asosiasi telah menyusun formulir self asesment GCG untuk perusahaan pialang asuransi/reasuransi.
- Formulir self asesment GCG tersebut telah disosialisasikan pada tanggal 21 Juli 2014
- Perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi wajib menyampaikan hasil self assessment GCG tahun 2014 paling lambat tanggal 28 Februari 2015

Kelembagaan dan Produk IKNB

UPDATE KEGIATAN KELEMBAGAAN IKNB

A. Pelaksanaan *Fit & Proper Test* IKNB per 31-07-2014

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Dijadwalkan/ Dok. Lengkap	Telah dianalisis & ditanggapi
	S.d. Juni 14	Juli 14				
Asuransi dan Reasuransi						
• Fit & proper test	231	16	247	166	0	81
• Penetapan kelulusan	289	0	289	84	0	289
Dana Pensiun						
• Fit & proper test	124	16	140	140	0	0
• Penetapan kelulusan	970	0	970	786	0	184
PP dan LJKL						
• Fit & proper test	209	66	275	163	54	58
• Penetapan kelulusan	394	0	394	394	0	0
Total	2.177	98	2,315	1.536	54	612
Persentase penyelesaian				75%	2%	23%

B. Produk Asuransi

Uraian	Permohonan		Total	Selesai	Telah diproses & ditanggapi	Proses Analisis
	S.d. Juni 14	Juli 14				
Pencatatan produk	420	74	494	303	191	0
Persetujuan <i>bancassurance</i>	379	10	389	235	151	3
Pencatatan perubahan produk	283	23	306	230	29	47
Pelaporan Nama lain	24	2	26	22	4	0
Total	1.106	109	1.215	790	375	50
Persentase Penyelesaian				65%	31%	4%

C. Izin Usaha & Proses Pencabutan Izin Usaha

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah diproses & ditanggapi	Dalam proses analisis
	S.d. Juni 14	Juli 14				
Asuransi :						
• Izin Usaha	7	0	7	4	2	1
• Cabut Izin	0	0	0	0	0	0
Dana Pensiun :						
• Izin Usaha	5	0	5	0	5	0
• Pembubaran	2	0	2	1	1	0
• Persetujuan rencana kerja likuidasi	5	1	6	4	2	0
• Persetujuan hasil penyelesaian likuidasi	5	1	6	3	3	0
LP & LJKL :						
• Izin Usaha	6	0	6	4	2	0
• Cabut Izin	10	0	10	8	2	0
Total	40	2	42	24	17	1
Persentase Penyelesaian				57%	41%	2%

Izin usaha baru: PT As. Cakrawala Proteksi Indonesia, PT As. Jiwa Taspen, PT As. Maipark, PT Brent Asuransi Jiwa, PT Jamkrida Kalsel, PT UAF Jaminan Kredit, PT Jamkrida Sumsel, PT Asuransi Jiwa BCA
Pencabutan izin: PT Maco Venturindo Kapital, Artha Nusa Sembada, PT Freeport Finance Indonesia, PT Singa Jaya Kapita; PT Siantar Top Multifinance, PT Tata International; PT Diamon Jaya Multi Finance; PT Cahyagold Prasetya Finance & Dana Pensiun Indorama

D. Proses terkait Kantor Cabang (KC) & Kantor Pemasaran (KP)

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah diproses & ditanggapi	Proses analisis
	S.d. Juni 14	Juli 14				
Asuransi						
•Pembukaan KC	30	1	31	20	11	0
•perubahan data KC	16	12	28	16	0	12
•Pelaporan KP	168	21	189	187	2	0
PP & LJK Lain						
•Pembukaan KC	61	10	71	15	56	0
•Penutupan KC	14	1	15	3	15	0
•perubahan data KC	100	10	110	96	14	0
Total	389	55	447	337	98	12
Persentase Penyelesaian				75%	22%	3%

UPAYA PERCEPATAN PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH (PPKD)

- Pentingnya pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mayoritasnya tidak memiliki jaminan dan keterbatasan aspek legal formal maupun kesulitan untuk memenuhi teknis persyaratan dari pihak perbankan, mengakibatkan pelaku sektor UMKM membutuhkan kehadiran perusahaan penjaminan kredit yang dihadapkan dapat menjamin Kredit UMKM tersebut sehingga akses masyarakat UMKM terhadap fasilitas kredit dapat diperluas.
- Percepatan Pembentukan PPKD merupakan salah satu program prioritas Pemerintah (Dikoordinir oleh Kementerian Perekonomian) dalam rangka pengembangan UMKM untuk mendorong perekonomian nasional.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan aktif dalam mempercepat proses pembentukan perusahaan penjaminan kredit daerah. Upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan oleh OJK antara lain:
- Melayani permintaan pemerintah daerah untuk berkonsultasi dalam proses pembentukan perusahaan penjaminan kredit;
- Turut memberikan pemahaman kepada pihak DPRD dan pemerintah daerah agar tercipta kesamaan visi tentang filosofi dan pentingnya perusahaan penjaminan untuk mendorong perekonomian daerah;
- Mengadakan workshop-workshop tematik terkait percepatan permohonan izin pembentukan perusahaan penjaminan kredit daerah.

UPAYA PERCEPATAN PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH (PPKD)

- Sejak tahun 2013, OJK telah menetapkan izin pembentukan penjaminan kredit daerah sejumlah 6 (enam) sehingga total terdapat 10 (sepuluh) perusahaan penjaminan kredit daerah di Indonesia, yaitu: PT Jamkrida Jatim, PT Jamkrida Bali Mandara PT Jamkrida Riau, PT Jamkrida NTB Bersaing, PT Jamkrida Jabar, PT Jamkrida Sumbar, PT Jamkrida Kalsel, PT Jamkrida Sumsel, PT Jamkrida Kalteng; dan PT Jamkrida Babel.
- Saat ini masih terdapat 24 (dua puluh empat) provinsi yang belum memiliki perusahaan penjaminan kredit: 8 (delapan) provinsi diantaranya telah memiliki peraturan daerah terkait pembentukan perusahaan penjaminan kredit daerah dan 16 (enam belas) provinsi yang lain belum memiliki peraturan daerah tersebut,
- Terkait dengan hal tersebut, pada tanggal 12 Agustus 2014 OJK telah mengundang perwakilan pemerintah daerah dan anggota DPRD dari 24 (dua puluh empat) provinsi tersebut dalam Workshop Perizinan Usaha Penjaminan Kredit, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian terkait dan perusahaan penjaminan kredit yang telah ada dan berkinerja baik.
- Kegiatan workhsop berjalan dengan baik dan melalui workshop tersebut, OJK juga menyatakan dukungan penuh terhadap program Pemerintah untuk mengakselerasi pembentukan perusahaan penjaminan kredit dan dan siap membantu percepatan proses perizinan perusahaan penjaminan yang diajukan ke OJK. OJK juga siap jika diminta untuk memberikan penjelasan kepada para anggota DPRD, Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya terhadap filosofi dan pentingnya perusahaan pembiayaan untuk mendorong perekonomian daerah.

PERKEMBANGAN IKNB

21 Agustus 2014



PERKEMBANGAN ASET IKNB

(2009 S.D. Tw 2 2014)

dalam triliun rupiah

No.	Industri	Tahun					TW2*
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Perasuransian	320,89	405,23	481,75	569,32	652,90	711,68
	- Asuransi Jiwa	141,65	188,46	228,80	269,25	278,65	306,36
	- Asuransi Umum & Re	40,16	48,27	57,88	71,08	107,01	106,04
	- Asuransi Sosial	87,49	107,03	121,93	144,13	157,15	9,40
	- Asuransi TNI/Polri	51,59	61,46	73,14	84,85	95,43	96,63
	- BPJS Ketenagakerjaan						172,92
	- BPJS Kesehatan						20,33
2	Dana Pensiun	112,53	130,39	142,03	158,37	162,06	174,24
	- DPPK PPMP	88,25	101,10	106,92	117,18	115,97	124,54
	- DPPK PPIP	9,28	11,30	13,36	15,37	16,42	17,89
	- DPLK PPIP	15,00	18,00	21,75	25,82	29,67	31,81
3	Lembaga Pembiayaan	175,54	233,07	294,55	356,08	420,14	434,36
	- Perusahaan Pembiayaan	174,44	230,30	291,38	341,77	400,63	412,75
	- Perusahaan Modal Ventura				7,19	8,55	8,97
	- Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	1,10	2,77	3,17	7,10	10,96	12,64
4	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	17,53	46,60	62,44	75,79	96,06	105,09
	- Perusahaan Penjaminan	1,67	3,11	5,09	6,97	8,71	9,18
	- Perusahaan Sekunder Pembiayaan Perumahan - PT SMF		2,57	4,82	6,18	7,48	8,02
	- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - LPEI		20,64	26,32	33,33	46,45	53,35
	- PT Pegadaian	15,86	20,28	26,22	29,31	33,42	34,54
5	Industri Jasa Penunjang IKNB	2,18	2,78	2,43	3,49	4,29	4,24
*)Keterangan:							
	Total Aset	628,67	818,07	983,20	1.163,05	1.335,45	1.429,61

Aset IKNB per 30 Juni 2014, kecuali: Perasuransian dan Perusahaan Modal Ventura per 31 Mei 2014, Jasa Penunjang per 31 Desember 2013 (audited)

PERKEMBANGAN JUMLAH PELAKU IKNB

(2009 S.D. Tw 2 2014)

No.	Industri	Tahun					TW 2
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Perasuransian	144	142	139	140	140	142
	- Asuransi Jiwa	46	46	45	47	49	51
	- Asuransi Umum & Re	93	91	89	88	86	86
	- Asuransi Sosial	2	2	2	2	2	3
	- Asuransi TNI/Polri	3	3	3	3	3	2
2	Dana Pensiun	276	272	270	270	265	264
	- DPPK PPMP				203		
		210	208	204		198	197
	- DPPK PPIP				42		
		41	40	41		43	43
	- DPLK PPIP		24		25		
		25		25		24	24
3	Lembaga Pembiayaan	273	273	283	291	282	274
	- Perusahaan Pembiayaan	198	192	195	200	202	199
	- Perusahaan Modal Ventura	74	79	86	89	78	73
	- Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	1	2	2	2	2	2
4	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	6	7	7	10	12	15
	- Perusahaan Penjaminan	3	4	4	7	9	12
	- Perusahaan Sekunder Pembiayaan Perumahan - PT SMF	1	1	1	1	1	1
	- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - LPEI	1	1	1	1	1	1
	- PT Pegadaian	1	1	1	1	1	1
5	Industri Jasa Penunjang IKNB	235	235	242	258	260	263
	Total	934	929	941	969	959	958

*) Ket : **Termasuk Syariah (Full Fledge(FF))**
Jumlah Unit Usaha Syariah per TW 22014

JUMLAH POLIS/PESERTA/KONTRAK

Jenis Industri	Per 31 Des 2013
Jumlah Peserta Dana Pensiun	3.591.707
Jumlah Polis Perusahaan Asuransi Jiwa (Konvensional)	45.123.934
• Individu	10.799.079
• Kumpulan	34.324.855
Jumlah Kontrak Perusahaan Pembiayaan	21.104.786
• Sewa Guna Usaha	174.571
• Anjak Piutang	7.548
• Kartu Kredit	779
• Pembiayaan Konsumen	20.921.888

IKNB SYARIAH

Pelaku IKNB Syariah

Keterangan	Posisi 31 Des 2013	Posisi 31 Maret 2014	Posisi 30 Juni 2014
Perusahaan Asuransi Syariah	49	48	48
- Asuransi Jiwa Syariah	20	20	20
- Asuransi Umum dan Kerugian Syariah	26	25	25
- Reasuransi Syariah	3	3	3
Lembaga Pembiayaan Syariah	48	48	48
- Perusahaan Pembiayaan Syariah	44	44	44
- Perusahaan Modal Ventura Syariah	4	4	4
Perusahaan Penjaminan Syariah	2	2	2
Total	99	98	98

Aset Asuransi Syariah

No	Jenis Indikator	TW IV 2013 ¹	TW I 2014	TW II 2014
1	Total Aset			
	Asuransi Jiwa Syariah	12,79	14,39	15,23
	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	3,87	4,01	4,03
	Jumlah	16,66	18,40	19,26
2	Total Investasi			
	Asuransi Jiwa Syariah	11,54	12,91	13,52
	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	2,76	2,74	2,74
	Jumlah	14,30	15,65	16,26
3	Kontribusi Bruto			
	Asuransi Jiwa Syariah	7,16	1,90	3,04
	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	1,72	0,40	0,54
	Jumlah	8,88	2,30	3,58
4	Klaim Bruto			
	Asuransi Jiwa Syariah	1,67	0,47	0,82
	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	0,85	0,21	0,32
	Jumlah	2,52	0,68	1,14
5	Kewajiban			
	Asuransi Jiwa Syariah	3,51	2,37	2,22
	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	2,00	2,05	1,99
	Jumlah	5,51	4,42	4,21

Aset Pembiayaan Syariah

No	Komponen	TW I 2014	TW II 2014
1	Kas dan Setara Kas	2.124	2.212
2	Efek Syariah yang Dimiliki	5	5
3	Piutang	19.393	19.052
4	Ijarah	1.748	1.856
5	Penyertaan	0	0
6	Persediaan	8	9
7	Aktiva Tetap dan Inventaris	50	74
8	Aktiva Lain-lain	1.522	1.504
	TOTAL AKTIVA	24.850	24.712

Terima Kasih....